

PENGARUH UPAH MINIMUM KOTA (UMK) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PEKANBARU (2009-2016)

Oleh

Herman

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau

Jln. HR Subrantas KM 12 Telp (0761) 63237 Fax (0761) 63366

E-mail : herman.2208@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to see the influence of City Minimum Wage Influence on Human Development Index of Pekanbaru City (2009-2016). The method used in this paper is literature study supported by quantitative descriptive analysis of secondary data. Secondary data used is data development of HDI, district/city minimum wage year 2009-2016 Pekanbaru city. The data are sourced from BPS Pekanbaru, and Bappeda Riau Province. the result of the research shows that the average minimum wage of Pekanbaru city for 8 years (2009-2016) is Rp 1.458.922, while the Human Development Index is only 78.42, in upper-medium category, so that the influence of independent variable to variable tied big enough that is 79.6 percent, so it is clear that the minimum wage of Pekanbaru city needs to be improved*

Keywords: *City Minimum Wage, Human Development Inde*

A. PENDAHULUAN

Kota pekanbaru merupakan ibukota sekaligus kota terbesar di provinsi Riau, dimana jumlah penduduknya pada tahun 2016 sebesar 1.064.566 jiwa. Maka pembangunan manusia menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi karena menyangkut kualitas manusia sehingga perlu mendapat perhatian. Ada 2 alasan yang mendasari pembangunan manusia perlu mendapat perhatian (Ginting dkk, 2008). Pertama, banyak negara berkembang yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun gagal mengurangi kesenjangan pembangunan manusia. Kedua, sumberdaya manusia sebagai input dalam proses pertumbuhan ekonomi, jika pembangunan manusia berhasil maka kualitas sumberdaya manusia semakin baik sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. berdasarkan kelompok umur, penduduk kota pekanbaru didominasi oleh usia produktif, yaitu penduduk dengan usia 15-64 tahun sebesar 69.91 persen pada tahun 2015, sedangkan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat kota pekanbaru masih didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA.

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), Untuk mengetahui tingkat indeks pembangunan suatu daerah dapat dideskripsikan melalui beberapa faktor, yaitu umur panjang dan sehat yang ditinjau dari segi kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah, dan rata-rata lamanya bersekolah untuk mengukur kinerja pembangunan apabila dilihat dari segi pendidikan; dan kemampuan masyarakat untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ditinjau dari segi rata-rata besarnya pengeluaran perkapita. Terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan dalam mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu Negara dalam konsep Indeks Pembangunan manusia yaitu : a. Tingkat kesehatan diukur dengan melihat harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi). b. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga). c. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun. berikut adalah gambaran indeks pembangunan manusia di Kota pekanbaru selama kurun waktu 2009-2016, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekanbaru

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2009	77,86%
2010	78,27%
2011	77,71%
2012	77,94%
2013	78,16%
2014	78,42%
2015	79,32%
2016	79,69%

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia, selama kurun waktu 8 tahun (2009-2016) selalu mengalami peningkatan namun peningkatannya cukup sedikit, yaitu rata –rata 0.32%. sementara dengan keadaan Kota Pekanbaru yang maju dimana penigkatan Indeks Pembangunan Manusianya masih rendah, yaitu belum mencapai 80,0 %.

United Nation Development Program (UNDP) membedakan tingkat human development index berdasarkan empat klasifikasi yakni: low (HDI<50%), lower – medium (HDI antara 50% dan 65,99%), upper –medium (HDI antara 66 dan 79,99) dan high (HDI 80 ke atas).

(Ginting dkk., 2008). Tujuan pengukuran HDI yaitu membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih, memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana, dan menciptakan ukuran mencakup aspek sosial dan ekonomi (Wicaksono, 2014)

Masalah tenaga kerja tidak terlepas dari upah minimum kota (UMK). Upah minimum ini merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industry yang banyak menyerap tenaga kerja.Semakin tinggi upah minimum kota suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya (Bappeda. 2010).

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak

diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi (Sulistiawati, 2012). Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja (Simanjuntak, 1992 dalam Gianie, 2009). Upah minimum kota merupakan komponen dari pendapatan seseorang yang tinggal di suatu daerah sehingga tingkat upah merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara. Peningkatan upah minimum kota akan meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan. Akibat peningkatan upah minimum yang diterima, daya beli masyarakat mengalami peningkatan sehingga berdampak positif pada human development index.

Upah minimum juga merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum Kota suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya (Bappeda. 2010).

Berikut adalah tabel mengenai upah minimum kota Pekanbaru dari tahun 2009 sampai 2016, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Upah Minimum Kota Pekanbaru

Tahun	Upah Minimum Kota Pekanbaru (Rp)	Kenaikan Upah Minimum Kota Pekanbaru (Rp)
2009	Rp 925.000	-
2010	Rp 1.055.000	Rp 130.000
2011	Rp 1.135.000	Rp 80.000
2012	Rp 1.260.000	Rp 125.000
2013	Rp 1.450.000	Rp 190.000
2014	Rp 1.775.000	Rp 325.000
2015	Rp 1.925.000	Rp 150.000
2016	Rp 2.146.375	Rp 221.375

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan bahwa kenaikan upah minimum kota Pekanbaru yang tertinggi adalah hanya berkisar Rp 325.000,- yaitu pada tahun 2014, dan sekarang pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu hanya Rp 221.375,- Dimana semakin tinggi tingkat upah minimum kota, maka akan mencerminkan tingkat ekonomi yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, 2014, Universitas Riau. Dari hasil analisis diketahui tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negative terhadap IPM, masing-masing dengan koefisien regresi sebesar -0,163 dan -0,084. Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM, dengan koefisien regresi masing-masing 0,005 dan 0,953. Variable yang sangat besar pengaruhnya terhadap IPM adalah laju pertumbuhan ekonomi.

Menurut Amirul, 2016. Universitas Airlangga. menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di 12 provinsi Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian yaitu Pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru (2009-2016).

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan, hasil akibat (dari suatu perbuatan), resiko (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:1250).

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan

dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (cq. Gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota), dan setiap tahun kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum.

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dasar yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu:

1. Dimensi umur panjang dan sehat.
2. Dimensi pengetahuan.
3. Dimensi kehidupan yang layak (BPS, 2012).

Indeks Pembangunan Manusia, karena dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, dengan demikian menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu Negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh Negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua

lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.

METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah telaah pustaka yang ditunjang dengan analisis deskriptif kuantitatif terhadap data-data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data perkembangan IPM, upah minimum kabupaten/kota tahun 2009-2016 kota Pekanbaru. Data-data tersebut bersumber dari BPS Pekanbaru, dan Bappeda Provinsi Riau.

Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) digunakan analisis regresi linear sederhana, Menurut J.Supranto dalam Syafrina (2017:9) persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X= Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rp)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

e = error term

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata tingkat Upah Minimum Kota Pekanbaru selama 8 tahun (2009-2016) sebesar Rp 1.458.922, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia hanya sebesar 78,42, yaitu dalam kriteria upper –medium. hal tersebut dapat dilihat pada tabel deskriptif, yaitu sebagai berikut :

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
IPM	78.4212	0.71325	8
UMK	1.458.922	4.44414	8

Sumber : hasil penelitian

Untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	76.332	.449	170.123	.000
	UMK	1.432	.000	4.842	.003

Sumber : hasil penelitian

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa nilai sig. pada variabel bebas sebesar 0,003 maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan, yaitu nilai sig < 0,05.

Sedangkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 79,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu sebesar 20,4%. hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu :

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.892 ^a	.796	.762

a. Predictors: (Constant), UMK

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil, maka pembahasan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang signifikan upah minimum kota terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Pekanbaru, hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf,2014, Universitas Riau, bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia. hal senada juga sama yang dilakukan oleh Amirul, 2016. Universitas Airlangga. menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di 12 provinsi Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menyimpulkan bahwa

1. Rata-rata Upah Minimum Kota Pekanbaru selama 8 tahun (2009-2016) hanya sebesar Rp 1.458.922,
2. Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru hanya dalam kriteria upper –medium.
3. Variabel Upah Minimum Kota berpengaruh Signifikan terhadap

Indeks pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru.

4. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 79,6 persen.

DAFTAR RUJUKAN

BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2017

UNDP. 2011. Human Development Report. (<http://www.hdr.undp.org.id>, diakses tgl 23 Juni 2016).

Amirul, 2016. Universitas Airlangga. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, PDRB Perkapita, dan Upah minimum terhadap IPM.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002.

Muhammad Nurcholis, 2014, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 12 No.1 Juni 2014

Nursiah Chalid Dan Yusbar Yusuf. Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau, *JURNAL EKONOMI*, Volume 22, Nomor 2 Juni 2014.

Rini Sulistiawati, 2012, Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia, *Jurnal EKSOS*, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012.

Syafrina, Nova. 2017. *Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Suka Fajar Pekanbaru*. Eko dan Bisnis (Riau Economics and Business Riview). Volume 8 Nomor 4 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Wicaksono, Muhammad Nur. 2014. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Angkatan Kerja, Dan Belanja Modal Daerah Terhadap Peningkatan PDRB Provinsi Di Indonesia Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*